

IMPLEMENTASI PROGRAM MAMPU (MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN) UNTUK MENCAPAI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN

Ronaldo Alfonso¹

This study aims to explain how the implementation of the MAMPU program is related to the issue of gender equality among migrant workers. The type of research used is descriptive. The data used is a type of secondary data obtained through the results of a digital literature review from books, journals, reports, documents, and internet sources that contain relevant data and information related to the research conducted by the author.

The results of the study indicate that migrant workers experience discrimination before their departure to the destination country of work. Social issues, education, information, and the registration system for prospective migrant workers to register for work have become a domino effect on prospective female migrant workers. The MAMPU program together with Migrant CARE has the same vision and mission to create a safe space for migrant workers through the DESBUMI Program and is also the beginning of the DESMIGRATIF program to solve the problems of migrant workers in Indonesia.

Keyword: Program MAMPU, DESBUMI, DESMIGRATIF, Indonesia.

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender adalah situasi tidak adil yang disebabkan oleh sistem dari struktur sosial. Ketidaksetaraan gender menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai korban dari sistem. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanya bisa dilihat dari kodrat. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2016) Ketidaksetaraan gender tidak hanya menjadi masalah sosial dan moral yang mendesak untuk ditangani, tetapi juga tantangan ekonomi yang kritis di tahun 2025. Di seluruh dunia perempuan telah mengalami diskriminasi sejak usia dini. Perempuan dikesampingkan haknya sebagai anak, dipaksa untuk menikah dan juga menjadi korban kekerasan bahkan sejak usia dini. Perempuan kurang diberikan akses untuk kesehatan dan pendidikan dikarenakan adanya perbandingan kekuatan yang tidak setara dalam kemitraan seksual dan konsekuensi dari kekerasan berbasis gender. (Mekala Krishnan, 2020)

Ketidaksetaraan gender juga mengakibatkan terhambatnya pendidikan untuk anak perempuan, menurut UNICEF hampir satu dari empat anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun tidak ada yang bekerja maupun dalam pendidikan atau pelatihan dibandingkan dengan satu dari sepuluh anak laki-laki. Anak perempuan menerima lebih sedikit dukungan daripada anak laki-laki, hal itu terjadi karena beberapa alasan seperti kebutuhan keamanan, kebersihan dan sanitasi anak perempuan. Dalam lingkup sekolah juga praktik pengajaran dan materi pendidikan yang diberikan bersifat deskriminatif yang menimbulkan kesenjangan gender dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan. (www.unicef.org, 2019)

Di Indonesia, isu kesetaraan gender merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera. Artinya,

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : ronaldo230398@gmail.com

tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang gender, daerah asal maupun individu. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menekan perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan. Kesetaraan dalam pembangunan ialah peningkatan kualitas hidup serta pemberdayaan perempuan semakin diakui sebagai hal yang penting dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang bisa menjangkau semua golongan. (Dyah Retno, 2016)

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan di Indonesia DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*) dari pemerintah Australia dan BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan) dari pemerintah Indonesia memulai inisiatif bertajuk: Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan. (www.ilo.org, 2014)

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan, hal ini sesuai dengan konsep *nawacita* butir kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga tercapainya Indonesia sejahtera. Kerjasama untuk pemberdayaan perempuan dilakukan Indonesia dengan Australia, kerjasama ini berfokus pada usaha untuk meningkatkan jangkauan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di wilayah-wilayah terpilih di Indonesia, dalam kerjasama upaya pengentasan kemiskinan yang dinamakan dengan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau MAMPU. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2019)

Pada tahun 2012 Australia melalui DFAT dan Indonesia melalui BAPPENAS membuat sebuah program yang bernama MAMPU. MAMPU terbagi menjadi 2 Fase, pada Fase 1 Program MAMPU membantu perempuan miskin mencapai tujuan RPJMN dengan peningkatan akses ke pelayanan dan program utama oleh pemerintah. (Kementerian PPN/Bappenas, 2020) Sejak tahun 2012, Program MAMPU berfokus kepada peningkatan kemampuan dan inovasi aksi kolektif di antara para mitra. Tujuan awal MAMPU adalah mendukung pengembangan kemampuan keuangan dan administrasi internal mitra, kemampuan membangun dan memelihara jaringan, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan media.

Adanya Program MAMPU memberi dukungan secara teknis kepada empat belas mitra utama yang terpilih. Mitra utama bekerja sama dengan seratus jaringan organisasi lokal di 944 desa dan 154 kabupaten/kota yang menjalankan kegiatan-kegiatan MAMPU di 27 provinsi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tujuan Program MAMPU fase II adalah untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia pada layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendukung tercapainya sasaran *Sustainable Development Goals* yang relevan untuk pemerintah Indonesia. (Bappenas, 2017) Dalam fase II, MAMPU membuat lima program area tematik. Kelima area tematik tersebut tidak hanya berkontribusi pada sejumlah prioritas dan target pemerintah melalui *nawacita* dan RPJMN, namun juga bagi sasaran *AUS-AID Investment Plan* untuk Indonesia, serta strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Australia. (DFAT-BAPPENAS, 2017)

Perkerja Migran adalah salah satu dari lima program area tematik yang akan dijalankan oleh MAMPU dalam upaya untuk memberikan akses kepada para pekerja migran di Indonesia. Dalam Program Pekerja Migran ini MAMPU bermitra dengan Migrant CARE. Migrant CARE berfokus pada penguatan perlindungan dan layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terhadap pekerja migran. Dengan dukungan MAMPU, Migrant CARE telah memperluas jaringan mereka yang luas di tingkat nasional untuk

menjaring mitra di tingkat kabupaten dan lokal di 9 pengirim migran kabupaten, di 5 provinsi di Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Bekerja sama dengan mitra lokal mereka, Migrant CARE telah mengembangkan dan menguji coba model untuk penyediaan layanan berbasis masyarakat untuk pekerja migran (pelatihan pra-keberangkatan, literasi keuangan, penanganan kasus) di 47 desa. Pengalaman ini telah memberi tahu mereka kampanye advokasi perubahan UU Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran serta untuk perubahan pemberian layanan dari pemerintah utama lembaga. Alhasil model DESBUMI mereka (Desa Peduli Buruh Migran) telah mempengaruhi skema DESMIGRATIF pemerintah nasional (Migran Produktif Village), yang saat ini sedang diujicobakan di 140 desa di 50 kecamatan.

Kerangka Teori

1. Feminisasi Migrasi

Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks. Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi.

Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (care work) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

2. Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Pengertian implementasi jika dirujuk dari pandangan Wheelen dan Hunger adalah sebuah usaha dalam mewujudkan suatu strategi yang telah disusun dalam bentuk tindakan maupun aktivitas melalui serangkaian prosedur program serta anggaran. Makna implementasi juga dimaksudkan untuk memahami tindakan yang dilakukan setelah suatu program dijalankan. Namun, proses pengimplementasian suatu program yang telah direncanakan dengan baik belum bisa menjamin keberhasilan dari program tersebut.

Program MAMPU sebagai hasil dari kerjasama Australia-Indonesia dalam pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Salah satu dari lima area tematik dalam Program MAMPU yaitu Pekerja Migran, dalam Pekerja Migran MAMPU memiliki fokus untuk mengentaskan masalah calon maupun mantan pekerja migran di Indonesia. MAMPU menjangkau area tematik Pekerja Migran bersama dengan mitra lokal Migrant CARE. Dari hasil kerjasama MAMPU bersama dengan Migrant CARE dalam menjangkau area tematik Pekerja Migran adalah dengan lahirnya

program DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dan disusul lahirnya program DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif).

Konsep Kesetaraan gender adalah tidak terdapat perbedaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak dan kesempatan bagi manusia, supaya dapat mengambil peran dalam bidang sosial budaya, pendidikan, hukum, ekonomi, politik hingga pertahanan keamanan sosial. Kesetaraan juga berarti sama rata dalam menikmati hasil pembangunan.

Hilangnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan menjadi tolak ukur keberhasilan kesetaraan gender, dengan demikian mereka memiliki akses yang sama, kesempatan berpartisipasi pada berbagai bidang yang sama, kontrol yang setara atas pembangunan dan merasakan manfaat dari pembangunan yang secara adil dan setara.pembangunan.(www.kemenpppa.go.id)

Terdapat indikator kesetaraan gender sebagai berikut diantaranya:

a. **Akses**

Akses adalah kesempatan dan peluang untuk menggunakan sumber daya tertentu dengan mempertimbangkan cara untuk memperoleh akses yang setara dan adil setara antara perempuan dan laki-laki.

b. **Partisipasi**

Keikutsertaan kelompok atau perorangan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan merupakan aspek dari partisipasi. Dalam hal ini apakah suatu keputusan tersebut telah ditetapkan dengan partisipasi penuh oleh seluruh anggota yang berperan tanpa memandang gender, semua anggota yang berperan mempunyai hak yang sama.

c. **Kontrol**

Kontrol adalah kekuatan, wewenang atau kekuasaan dalam mengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penulis menjelaskan bagaimana implementasi Program MAMPU untuk tercapai kesetaraan gender di Indonesia studi kasus: Pekerja Migran. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga situs internet.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2011 Australia melalui DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*) melakukan proses seleksi dan indentifikasi kepada tujuh organisasi dan satu organisasi internasional yang akan bekerja di satu dari lima daerah tematik yang memiliki anggota dan mitra lokal yang mampu menjangkau perempuan miskin. Pada tahap ini mitra terpilih yaitu: Koalisi perempuan Indonesia, PEKKA, Komnas Perempuan, Kapal Perempuan, Aisyiyah, Migrant CARE, BaKTI, dan ILO (*International Labour Organizations*). Pada tahun 2012, DFAT memberikan AUD100.000 kepada masing-masing mitra terpilih terkecuali Komnas Perempuan yang menerima hibah AUD350.000 dan juga ILO yang menerima hibah AUD500.000 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan dan mengembangkan program kerja jangka panjang.([Australian Aid Program, 2014](#))

Program MAMPU adalah sebuah kerjasama antara Australia-Indonesia, Australia diwakili DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*) dan Indonesia bersama dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), bertujuan untuk mensejahterakan perempuan miskin di Indonesia, MAMPU memperkuat organisasi dan anggota parlemen yang memiliki ketertarikan pada gender untuk memberi pengaruh pada kebijakan yang ada dalam pemerintahan. MAMPU adalah program delapan tahun (2012-2020), Fase I Program MAMPU dimulai pada tahun 2012-2016 dan Fase II dimulai pada tahun 2016-2020. (Farida Fleming, 2015)

Fokus awal MAMPU yaitu untuk mendukung pengembangan kapasitas internal mitra dalam finansial dan administrasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan serta bekerjasama dengan beragam pihak, khususnya dengan pemerintah dan media. Dukungan berkelanjutan ini termasuk bantuan teknis, analisis pemangku kepentingan, perencanaan tahunan, pengembangan basis bukti dan menghubungkan ke organisasi luar untuk membentuk hubungan baru dan koalisi dukungan.

Dukungan berkelanjutan ini termasuk bantuan teknis, analisis pemangku kepentingan, perencanaan tahunan, pengembangan basis bukti dan menghubungkan ke organisasi luar untuk membentuk hubungan baru dan koalisi dukungan.

A. Program DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) untuk Mencapai Kesetaraan gender

DESBUMI atau Desa Peduli Buruh Migran adalah inisiatif yang telah dimulai sejak tahun 2013. DESBUMI di bawah Migrant CARE dengan dukungan Program MAMPU bersama dengan mitra di lima provinsi Indonesia mengawali dengan pemetaan kondisi Pekerja Migran di Indonesia dan di desa-desa kantong pekerja migran. (Migrant CARE) DESBUMI memiliki fitur utama yaitu keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam layanan ini dan bertugas mengumpulkan data para pekerja migran. (PPN/Bappenas) DESBUMI memiliki peran penting dalam UU daerah dan nasional termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (No.18/2017) yang disahkan oleh parlemen Indonesia pada tahun 2017. (PPN/Bappenas)

Desa merupakan wilayah yang pertama dimana fase migrasi calon tegana kerja migran bermula. Tetapi, selama ini desa hanya berperan dalam memberikan surat keterangan bagi warganya yang berangkat ke luar negeri. Dokumentasi yang tidak baik dan bahkan menjadi lahan peluang untuk memalsukakn dokumen, melalui DESBUMI desa mampu berperan lebih aktif dalam memberikan pelayanan dan memberikan perlindungan warganya yang pergi berkerja ke luar negeri. (Migrant CARE)

Perdes (Peraturan Desa) perlindungan pekerja migran ini memberikan sebuah perubahan yang terbagi menjadi empat diantaranya yaitu; (M Rahayu) Pertama, timbulnya sebuah perubahan norma yang menjadikan perempuan lebih berani untuk berbicara, berkelompok dan memengaruhi kebijakan publik di desa. Kedua, dapat mengurangi masalah dan kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran dengan memberikan fasilitas untuk pengurusan dokumen secara legal dalam tingakt desa melalui DESBUMI.

Ketiga, dapat memberikan bantuan kepada pemerintah desa agar dapat memiliki data migrasi penduduk yang memungkinkan pemerintah memonitor proses keluar masuknya warga desa ke luar negeri, dan juga bersinergi dengan banyak pihak untuk membuat program pemberdayaan. Keempat, bisa membuka peluang adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang menjadi alternatif penghasilan bagi para eks PMI (Pekerja

Migran Indonesia). Dengan hadirnya Perdes ini juga bisa berguna untuk memperkuat basis legitimasi kerja kader DESBUMI.

DESBUMI adalah program untuk membantu para calon dan mantan pekerja migran di Indonesia. DESBUMI di bentuk dan diimplementasikan di 36 desa dan 8 kabupaten, pemilihan desa dilakukan dengan 6 pemetaan sosial.

1. Jejaring sosial yang ada struktur sosial-demografis desa, dan hubungan kekuasaan yang ada untuk mengidentifikasi pintu masuk, potensi hambatan, pendukung potensial untuk inisiatif baru, dan aktor yang mungkin menolak inisiatif baru.
2. Prioritas dan kebutuhan perempuan di desa dan masalah utama yang dihadapi perempuan
3. Keragaman setempat, budaya, dan norma sosial khususnya yang berkaitan dengan norma gender
4. Kelompok untuk perempuan dan bentuk organisasi yang mewakili keberagaman perempuan di desa
5. Keadaan dalam hal kesadaran gender, pengetahuan tentang hak, sikap terhadap peran gender, dan tanggung jawab gender.
6. Pengetahuan dan kapasitas pemimpin yang ada untuk memajukan pemberdayaan perempuan.

Program DESBUMI memiliki 3 manfaat pada daerah Lombok Tengah yaitu:

1. Pusat Informasi

Pusat informasi merupakan salah satu bentuk bantuan yang dilakukan oleh DESBUMI kader pelaksana yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa mensosialisasikan migrasi yang aman ke tingkat dusun. Pusat informasi juga bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memilih pekerjaan dan tujuan migrasi yang aman melalui official perusahaan, dimana program DESBUMI kader yang mendampingi masyarakat yang bermigrasi melalui saluran resmi, sehingga program DESBUMI juga bisa mendapatkan dukungan dari BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu mengakses perusahaan resmi untuk menjadi diberitahukan kepada masyarakat Desa Darek jadi bahwa mereka terus menjalani migrasi proses melalui saluran resmi.

2. Pusat Data Mobilitas

Data mobilitas juga bertujuan untuk mencatat keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Ini akan membantu desa tahu berapa banyak orang bekerja dan yang telah kembali dari luar negeri sebagai pekerja migran.

3. Pusat Pengaduan Kasus atau Pembelaan

Pusat pengaduan kasus merupakan bentuk pendampingan dari program DESBUMI dalam penanganan kasus atau penerimaan kasus pada masyarakat Desa Darek di luar negeri. Pelaksana program DESBUMI dapat langsung menerima kasus melalui media sosial dari para pekerja migran tersebut. Namun terkadang para pelaksana program DESBUMI menghadapi kendala terkait masyarakat yang tidak mau mengkonfirmasi masalah tersebut.

Untuk Lombok Tengah sendiri, DESBUMI memiliki 3 cara perlindungan terhadap migran

1. Pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant CARE serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman.
2. Pendampingan setelah bekerja yakni program DESBUMI dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migrant CARE, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program DESBUMI di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
3. Pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migran diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migrant CARE, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah.

Perdes (Peraturan Desa) perlindungan pekerja migran ini memberikan sebuah perubahan yang terbagi menjadi empat diantaranya yaitu; (M Rahayu) Pertama, timbulnya sebuah perubahan norma yang menjadikan perempuan lebih berani untuk berbicara, berkelompok dan memengaruhi kebijakan publik di desa. Kedua, dapat mengurangi masalah dan kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran dengan memberikan fasilitas untuk pengurusan dokumen secara legal dalam tingakt desa melalui DESBUMI.

Ketiga, dapat memberikan bantuan kepada pemerintah desa agar dapat memiliki data migrasi penduduk yang memungkinkan pemerintah memonitor proses keluar masuknya warga desa ke luar negeri, dan juga bersinergi dengan banyak pihak untuk membuat program pemberdayaan. Keempat, bisa membuka peluang adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang menjadi alternatif penghasilan bagi para eks PMI (Pekerja Migran Indonesia). Dengan hadirnya Perdes ini juga bisa berguna untuk memperkuat basis legitimasi kerja kader DESBUMI.

DESBUMI adalah program untuk membantu para calon dan mantan pekerja migran di Indonesia. DESBUMI di bentuk dan diimplementasikan di 36 desa dan 8 kabupaten, pemilihan desa dilakukan dengan 6 pemetaan sosial.

7. Jejaring sosial yang ada struktur sosial-demografis desa, dan hubungan kekuasaan yang ada untuk mengidentifikasi pintu masuk, potensi hambatan, pendukung potensial untuk inisiatif baru, dan aktor yang mungkin menolak inisiatif baru.
8. Prioritas dan kebutuhan perempuan di desa dan masalah utama yang dihadapi perempuan
9. Keragaman setempat, budaya, dan norma sosial khususnya yang berkaitan dengan norma gender
10. Kelompok untuk perempuan dan bentuk organisasi yang mewakili keberagaman perempuan di desa
11. Keadaan dalam hal kesadaran gender, pengetahuan tentang hak, sikap terhadap peran gender, dan tanggung jawab gender.
12. Pengetahuan dan kapasitas pemimpin yang ada untuk memajukan pemberdayaan perempuan.

Program DESBUMI memili 3 manfaat pada daerah lombok tengah yaitu:

4. Pusat Informasi

Pusat informasi merupakan salah satu bentuk bantuan yang dilakukan oleh DESBUMI kader pelaksana yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa mensosialisasikan migrasi yang aman ke tingkat dusun. Pusat informasi juga bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memilih pekerjaan dan tujuan migrasi yang aman melalui official perusahaan, dimana program DESBUMI kader yang mendampingi masyarakat yang bermigrasi melalui saluran resmi, sehingga program DESBUMI juga bisa mendapatkan dukungan dari BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu mengakses perusahaan resmi untuk menjadi diberitahukan kepada masyarakat Desa Darek jadi bahwa mereka terus menjalani migrasi proses melalui saluran resmi.

5. Pusat Data Mobilitas

Data mobilitas juga bertujuan untuk mencatat keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Ini akan membantu desa tahu berapa banyak orang bekerja dan yang telah kembali dari luar negeri sebagai pekerja migran.

6. Pusat Pengaduan Kasus atau Pembelaan

Pusat pengaduan kasus merupakan bentuk pendampingan dari program DESBUMI dalam penanganan kasus atau penerimaan kasus pada masyarakat Desa Darek di luar negeri. Pelaksana program DESBUMI dapat langsung menerima kasus melalui media sosial dari para pekerja migran tersebut. Namun terkadang para pelaksana program DESBUMI menghadapi kendala terkait masyarakat yang tidak mau mengkonfirmasi masalah tersebut.

Untuk Lombok Tengah sendiri, DESBUMI memiliki 3 cara perlindungan terhadap migran

4. Pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant CARE serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman.
5. Pendampingan setelah bekerja yakni program DESBUMI dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migrant CARE, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program DESBUMI di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
6. Pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migrant CARE, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah.

Program DESBUMI memenuhi kekesesuaian dari Implementasi dengan program dan penerima manfaat. Dengan adanya Perdes yang ada di setiap desa dengan lumbung penghasil pekerja migran. Akses perempuan untuk mendapat keadilan dengan adanya perlindungan dari desa juga merupakan upaya dari DESBUMI untuk membuka jalan yang setara bagi perempuan pekerja migran.

Migrant CARE sebagai NGO yang menjadi mitra lokal dengan MAMPU juga berperan sebagai penghubung untuk mencapai akar rumput untuk melihat masalah-

masalah yang timbul di desa. Migrant CARE dengan bermitra dengan MAMPU berhasil memberikan Output dan Outcome yang efektif dalam pelaksanaan program DESBUMI. Dengan memberikan akses serta dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam program DESBUMI dapat mencapai indikator dari kesetaraan gender.

Dengan membentuk layanan informasi terpadu guna memuat data pekerja migran untuk bermigrasi aman DESBUMI telah memberikan akses bagi perempuan untuk mendapatkan layanan secara adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, DESBUMI menyediakan layanan pengumpulan KTP, KK, dan surat keterangan yang digunakan DESBUMI untuk pembuatan dokumen yang diperlukan untuk keluar negeri.

Layanan pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah upaya DESBUMI dalam memberikan akses ekonomi yang adil bagi perempuan. Dengan program layanan pemberdayaan ekonomi juga perempuan dapat ikut dalam partisipasi untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta untuk memenuhi hak yang sama bagi perempuan.

Layanan pengaduan kasus dalam yang di sediakan oleh DESBUMI agar calon pekerja migran maupun pekerja migran yang bermasalah dapat melakukan pengaduan kasus yang telah disediakan dalam layanan tersebut. Layanan pengaduan kasus dari DESBUMI juga merupakan bentuk dari kontrol perempuan untuk memberikan kekuatan, wewenang dan dalam pengambilan keputusan agar tidak didominasi gender tertentu. Sosialisasi untuk bermigrasi secara aman dan Pendataan secara reguler merupakan cara DESBUMI untuk memberikan ruang aman bagi pekerja migran agar memiliki kontrol.

B. Program DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif) untuk Mencapai Kesetaraan Gender

Desa migran Produktif adalah desa yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja migran, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga TKI, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, memiliki layanan bagi anak-anak TKI, dan melalui peran aktif pemerintah desa dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan. (Komir Bastaman, 2020)

Pada tahun 2017 kementerian ketenagakerjaan menerapkan program Desmigratif pada 120 desa. Dan salah satu lokasi yang ditunjuk terletak di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipar, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Arjowali menjadi pilihan dikarenakan sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai PMI. Data yang didapatkan dari arsip Kantor Desa Arjowilangun jumlah PMI mencapai angka 669 jiwa selain itu juga terdapat 773 jiwa mantan PMI. (Putri Nabil, 2019)

Buruh Migran Produktif Indonesia Program desa (DESMIGRATIF) diperkenalkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2017 adalah hal lain contoh. Dalam upaya meningkatkan desa berbasis pemberian layanan program kepada migran perempuan pekerja dan keluarganya, SAF bersama dengan Serikat Pekerja Migran Indonesia sedang melakukan proyek penelitian tindakan partisipatif. Penelitian akan berfungsi sebagai kerangka kerja dan alat untuk memperkuat sistem desa berbasis bukti untuk keamanan dan keadilan migrasi, dan memastikan bahwa program dan layanan sensitif gender. (www.ilo.org, 2021)

Bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Migran Produktif (Desa Puworejo). (Anita Rosiyanti, 2020)

1. Srikandi Masak
2. Srikandi Batik
3. Srikandi Jahit
4. Srikandi Rajut

Desmigratif di desa Arjowilangun Kabupaten Malang

Keberangkatan PMI banyak melalui calo yang datang ke desa-desa kantong PMI yang memberikan pengaruh buruk dengan menambahnya jumlah PMI non prosedural. Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan suatu program bernama Desa Migran Produktif yang memuat 4 pilar Desmigratif yang diatur dalam pasal 7 Permenaker nomor 2 Tahun 2019 yaitu: (Salsabila Kartika, 2020)

1. Pusat Layanan Migrasi

Informasi yang di berikan oleh petugas Desmigratif antara lain informasi pasar kerja, informasi tata cara bekerja di luar negeri, serta pengurusan dokumen awal. Selain itu, petugas desmigratif juga akan memberikan informasi-informasi di luar pasar kerja yaitu mengenai pembuatan KIS dan BPJS, sehingga selain berperan sebagai petugas Desmigratif juga berperan sebagai Layanan Masyarakat.

2. Kegiatan Usaha Produktif

Kegiatan usaha produktif diatur dalam pasal 7 ayat (3) Permenaker nomor 2 Tahun 2019, merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberdayakan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Khususnya Purna PMI yang sudah kembali ke daerah asal kemudian diharapkan setelah sukses menjadi wirausaha tidak akan berangkat menjadi PMI.

3. Community Parenting

Community Parenting diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker nomor 2 tahun 2019, merupakan kegiatan yang mempertemukan para orang di desa Desmigratif untuk diberikan penyuluhan bagaimana cara merawat, membimbing, dan mendidik anak.

4. Pembentukan Koperasi

Pelaksanaan Program Pembentukan koperasi diatur dalam pasal 7 ayat (5) Permenaker nomor 2 2019, merupakan kegiatan jangka panjang program desmigratif, diharapkan dengan adanya koperasi desa dapat menampung usaha milik warga hasil dari pelatihan kegiatan usaha produktif serta warga mendapatkan kesejahteraan melalui koperasi tersebut.

Program Desmigratif bertujuan untuk dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Program desmigratif dihadirkan di desa-desa yang mayoritas warganya bekerja sebagai pekerja migran atau lazim disebut desa kantong TKI salah satunya di desa Uzurumba Barat. Dalam program ini juga terdapat program unggulan di desa tersebut yang mengelola kemiri menjadi minyak kemiri yang di hasilkan dari dari alam di desa Uzurumba Barat. (Media Kajian, 2020)

Program Unggulan tersebut dikerjakan secara berkelompok, semua dilibatkan masyarakat desa Uzurumba Barat untuk mengelola kemiri dan hal ini dilakukan masyarakat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan pemerintah desa tersebut. Pelatihan yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat mampu mengelola kemiri menjadi minyak kemiri yang unggul dan berkualitas. (Media Kajian, 2020)

Upaya dari program DESMIGRATIF untuk mencapai kesetaraan gender dengan cara memberikan perlindungan kepada para pekerja migran dan juga pemberdayaan perempuan mantan migran dari desa. Desa Migran Produktif memiliki 4 pilar sebagai dari output dari kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Perempuan mendapat kontrol yang yang tidak didominasi oleh gender tertentu serta mendapat akses untuk menggunakan sumber daya dan peluang untuk produktif.

Pusat layanan migrasi yang disediakan merupakan akses yang diberikan demi mempermudah calon pekerja migran untuk menentukan pasar kerja dan mempermudah dapat mendapatkan informasi tata bekerja diluar negeri. Kegiatan usaha produktif merupakan bentuk partisipasi yang diberikan agar para pekerja migran tetap bisa menghasilkan kebutuhan ekonomi meskipun sudah kembali ke tanah air. *Community Parenting* adalah partisipasi yang dibentuk dalam DESMIGRATIF untuk memberikan layanan kepada calon pekerja migran yang meninggalkan anak-anak untuk bekerja di luar negeri.

Pembentukan Koperasi adalah kontrol yang disediakan oleh DESMIGRATIF untuk meningkatkan ekonomi mantan pekerja migran. Dengan adanya pilar pada Program DESMIGRATIF juga memberikan perempuan kesempatan untuk mendapatkan hak dalam pengambilan keputusan untuk bisa tetap memiliki partisipasi untuk memajukan ekonomi dari desa tanpa ada hubungan dengan gender tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program MAMPU dapat memberi pengaruh yang signifikan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia. Lima area tematik yang terdiri dari Perlindungan Sosial, Deskriminasi di Tempat Kerja, Pekerja Migran, Kesehatan, dan Kekerasan perempuan. Program MAMPU bersama dengan 14 mitra lokal terpilih yang ikut ambil andil dalam program area tematik MAMPU juga telah bekerja keras dalam mewujudkan kesetaraan gender bersama dengan organisasi-organisasi akar rumput yang ikut dalam mewujudkan pencapaian MAMPU untuk mengentaskan kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam studi kasus Pekerja Migran, MAMPU bekerjasama dengan Migrant CARE sebuah organisasi NGO yang memiliki fokus pada pekerja migran, hasil dan kemitraan MAMPU dan Migrant CARE menghasilkan DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dan disusul dengan lahirnya sebuah program yang dinamakan dengan DESMIGRATIF (Desa Migrant Kreatif). Program dari DESBUMI yang memberikan 6 layanan dan program DESMIGRATIF yang berpangku pada 4 pilar membuat perubahan secara perlahan untuk memberikan ruang aman kepada calon dan mantan pekerja migran di Indonesia. Program DESBUMI dan Program DESMIGRATIF dalam implentasinya memenuhi kesesuaian dalam keberhasilan program dari MAMPU dengan mitra Migrant CARE. MAMPU berusaha untuk mencapai kesetaraan gender, bersama dengan mitranya Migrant CARE. Dalam program hasil kemitraan ini kesetaraan gender diwujudkan dalam DESBUMI dan DESMIGRATIF.

Refrensi

- Anita Rosiyanti and Fulia Aji Gustaman, “Pemberdayaan Perempuan Di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal,” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 9, no. 1 (2020): 978–89.
- Australian Aid Program, “MAMPU : Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Implementation Strategy,” no. March (2014).
- Bappenas, “Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program Mampu Kemitraan Australia Dan Indonesia Untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II,” Bappenas, 2017, <https://bappenas.go.id/id/berita/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-Australia-dan-Indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii#:~:text=“Tujuan program MAMPU Fase II,relevan untuk pemerintah Indonesia%2C”> jelas.
- DFAT-BAPPENAS, “Indonesia-Australia-Partnership-Gender-Equality-Mampu-Strategic-Plan-2017-2020.”
- Dyah Retno Tusianti Ema, Prihatiningsih, “KAJIAN AWAL INDEKS KETIMPANGAN GENDER 2016,” *BADAN PUSAT STATISTIK*, 2016.
- Farida Fleming and Penny Davis, “Mid-Term Review of Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction : Verification of the Performance Story and Forward Plan,” no. July (2015), <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-mampu-verification-report-man-resp.aspx>.
- ILO Regional Office for Asia and the Pacific, *Implementation of Recommendations from the 3rd to 12th ASEAN Forums on Migrant Labour (AFML): Progress Review Background Paper for the 13th AFML*, 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_816986.pdf.
- International Labour Organization, “MAMPU-Access to Employment and Decent Work for Women Project (Phase 2),” terdapat, https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183299/lang--en/index.htm.
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dan BADAN PUSAT STATISTIK, “Profil Perempuan Indonesia 2011-2015,” 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Resume Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/967be-resume-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>
- Kementerian PPN/Bappenas, “MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Di Indonesia,” *MAMPU* 2018, no. Id (2020).
- Kementrian pemberdayaan perempuan, “Issn 2089-3531,” *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, 2019.
- Komir Bastaman, Ade Nawawi, and Taharudin Taharudin, “Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang,” *The World of Public Administration Journal* 2, no. 2 (2020): 169–91, <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.928>.
- M Rahayu and N M R Abheseka, “Advokasi Perempuan Desa Dalam Memperkuat Perlindungan Bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes Dan Perda Perlindungan TKI= Village Women’s ...,” *University of Melbourne with*

- Universitas Gadjah Mada and MAMPU*, 2020, 165–88, <https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/268257>.
- M Rahayu and N M R Abheseka, “Advokasi Perempuan Desa Dalam Memperkuat Perlindungan Bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes Dan Perda Perlindungan TKI= Village Women’s ...,” *University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU*, 2020, 165–88, <https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/268257>.
- Media Kajian, “Jurnal Civic Education :” 4, no. 1 (2020).
- Mekala Krishnan, “Ten Things To Know About Gender Equality,” terdapat, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/ten-things-to-know-about-gender-equality>.
- Migrant CARE, “DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran),” n.d., <https://migrantcare.net/DESBUMI/>.
- PPN/Bappenas, “MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Di Indonesia.”
- Putri Nabil Lely Indah Mindarti, “PEMBERDAYAAN MANTAN MIGRAN INDONESIA MELALUI PROGRAM DESMIGRATIF (Studi Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang),” 2019.
- Salsabila Kartika Putri and Arianto Nugroho, “Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194>.
- Unicef, “Equal Rights and Opportunities for Girls and Boys Help All Children Fulfil Their Potential.,” n.d., <https://www.unicef.org/gender-equality>.